

***Tourism Village Facilitation Policy Using The New Public Service Concept
Sindangkasih District Ciamis Regency***

Kebijakan Fasilitas Desa Wisata Dengan Memanfaatkan Konsep *The New Public Service* Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis

Thomas Bustomi

Adminstrasi Publik FISIP UNPAS
thomas.bustomi@unpas.ac.id

Disubmit : 20 Juli 2025, Diterima : 12 Agustus 2025, Terbit: 17 Agustus 2025

ABSTRAK

Pertumbuhan sektor kepariwisataan di Kabupaten Ciamis dirasakan belum berkembang secara signifikan karena peningkatannya baru tumbuh antara 5 sampai 10 persen. "Infrastruktur sebagai penunjang Aksesibilitas dan Anggaran yang tersedia menjadi kendala terbesar dalam menjadikan Pariwisata sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis Selanjutnya, aspek-aspek yang harus dibenahi dalam pengembangan pariwisata Ciamis diantaranya: menyangkut aspek pemasaran oroginalitas branding, nilai-nilai kearifan lokal, masalah promosi, karena hotel- hotel masih terbatas setidaknya dikembangkan home stay, aksestabilitas ke lokasi wisata diperbaiki, packaging yang lebih menarik, penataan managerial pegiat wisata termasuk BUMDES, adanya sinergi wisata antara objek wisata satu dengan lainnya juga diperlukan regulasi kebijakan pengembangan yang mendukung untuk pemasaran, branding, dan peningkatan kunjungan wisata. Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan seperti sharing dengan instansi-instansi terkait, melakukan sosialisasi, memperkuat komunikasi, mengadakan rekrutmen dan pembinaan pegawai, melakukan koordinasai, kerjasama dalam program instansi lain, membuat skala prioritas, menginput kebutuhan pegawai, memberikan informasi yang jelas ke masyarakat.

Kata Kunci : Fasilitas Kebijakan, Pariwisata, *The New Public Service*.

Abstract

It is felt that the growth of the tourism sector in Ciamis Regency has not developed significantly because the increase has only grown between 5 and 10 percent. "Infrastructure as a support for accessibility and available budget is the biggest obstacle in making tourism a support for Ciamis Regency's Original Regional Income (PAD). Furthermore, aspects that must be addressed in the development of Ciamis tourism include: regarding marketing aspects, originality, branding, local wisdom values, promotional issues, because hotels are still limited, at least home stays are developed, accessibility to tourist locations is improved, more attractive packaging, managerial arrangements for tourism activists including BUMDES, there is a tourism synergy between one tourist attraction and another, development policy regulations are also needed that support marketing, branding and increasing tourist visits. However, there are efforts that have been made, such as sharing with related agencies, conducting outreach, strengthening communication, conducting employee recruitment and development, coordinating, collaborating with other agency programs, creating a priority scale, inputting employee needs, providing clear information to the public.

Keywords: Policy Facilitation, Tourism, *The New Public Service*

1. Pendahuluan

Pengembangan pariwisata merupakan suatu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik objek wisata, baik dari aspek alam maupun budaya, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung dan berkontribusi terhadap perekonomian

lokal maupun nasional. Kehadiran wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, tidak hanya menambah devisa negara, tetapi juga meningkatkan pendapatan asli daerah serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar (Sari & Kagungan, 2016). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata pada era sekarang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan.

Secara konseptual, pembangunan pariwisata idealnya didasarkan pada empat elemen utama, yakni keberlanjutan ekologi, sosial budaya, ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata harus menjamin perlindungan terhadap lingkungan, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial budaya yang menjadi identitas masyarakat (Junaidi et al., 2022). Lebih jauh, kegiatan pariwisata juga diharapkan menciptakan peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang sehat serta kompetitif, sehingga mampu memperkuat struktur perekonomian desa (Nguyen et al., 2021). Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif (Fatihin et al., 2020; Idrus & Hakim, 2024).

Dalam konteks desa wisata, kebijakan fasilitasi yang diberikan pemerintah daerah maupun pemerintah desa berperan signifikan dalam mendorong terwujudnya desa berbasis pariwisata yang mandiri. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam regulasi, fasilitasi, serta penguatan kelembagaan (Mamonto et al., 2021; Novando et al., 2022). Kebijakan tersebut harus dirancang dengan memperhatikan karakteristik lokal, kearifan budaya, serta potensi sumber daya yang ada agar tercipta keberlanjutan pariwisata (Allyreza & Winangsih, 2022; Farhan et al., 2022).

Lebih lanjut, pengembangan desa wisata juga memerlukan model pengelolaan yang terintegrasi, baik melalui inovasi maupun kolaborasi antar-stakeholder. Hal ini terbukti dapat meningkatkan daya saing desa wisata sekaligus memperkuat jejaring antar destinasi (Azikin & Fewidarto, 2023; Junaidi et al., 2022). Keberadaan daya tarik wisata, baik yang bersifat alami maupun buatan, harus dikelola dengan memperhatikan aspek keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh wisatawan, tetapi juga oleh masyarakat lokal sebagai pemilik utama sumber daya (Nguyen et al., 2021). Dengan demikian, kebijakan fasilitasi desa wisata melalui perspektif *New Public Service* menjadi relevan untuk memastikan bahwa masyarakat bukan hanya objek, tetapi juga subjek utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Idrus & Hakim, 2024; Novando et al., 2022).

2. Metode

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan integrative kelembagaan diawali dengan pendekatan deskriptif dilakukan untuk menjaring data para pengambil kebijakan di Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, digunakan untuk memperdalam informasi tentang pemberdayaan desa wisata. Populasi penelitian ini adalah seluruh stakeholder secara logframe terdiri dari pejabat dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan Masyarakat yang bersinggungan langsung dengan objek wisata di Kecamatan Sindang Kasih. Instrumen kegiatan dibuat dengan mengacu pada efektivitas fasilitasi potensi objek wisata sebagai topik utama. Pendalaman yang digunakan adalah 1) pencapaian tujuan, 2) kemampuan integrasi, 3) kemampuan adaptasi, 4) pelanggan, dan 5) internal process.

3. Hasil Pelaksanaan

Kecamatan Sindang Kasih Kabupaten Ciamis

Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 1.433,82 km² dengan jumlah penduduk sebesar 1.328.223 orang menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dari 958 orang per km² pada Tahun 2013 menjadi 962 orang per km² pada Tahun 2014. Dari segi penyebarannya, 9,03 persen penduduk Kabupaten Ciamis bertempat tinggal di Kecamatan Banjarsari dikarenakan Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Ciamis, sedangkan Kecamatan Ciamis 2,62 persen sehingga menyebabkan kepadatan tertinggi (3.195 orang per

kilometer persegi). Kepadatan cukup tinggi juga dialami oleh Kecamatan Sindangkasih, Cihaurbeuti dan Lumbung. Kepadatan penduduk juga tampak dari rata-rata anggota keluarga yang mencapai 3,09 sehingga secara umum setiap keluarga memiliki 3 orang anggota keluarga. Tabel lain menggambarkan perbandingan usia penduduk tidak produktif (usia 0-14 & 65+ tahun) dibanding usia produktif (usia 15-64 tahun) yang menunjukkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan pada Tahun 2014 sebesar 49 persen dan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Komposisi penduduk menurut usia, nampaknya perlu dicermati karena penduduk kelompok usia 5-9 tahun, 10-14 tahun dan usia 15-19 tahun cukup banyak. Hal ini berkaitan dengan masalah pendidikan dasar dan fertilitas atau kesehatan reproduksi.

Objek Wisata

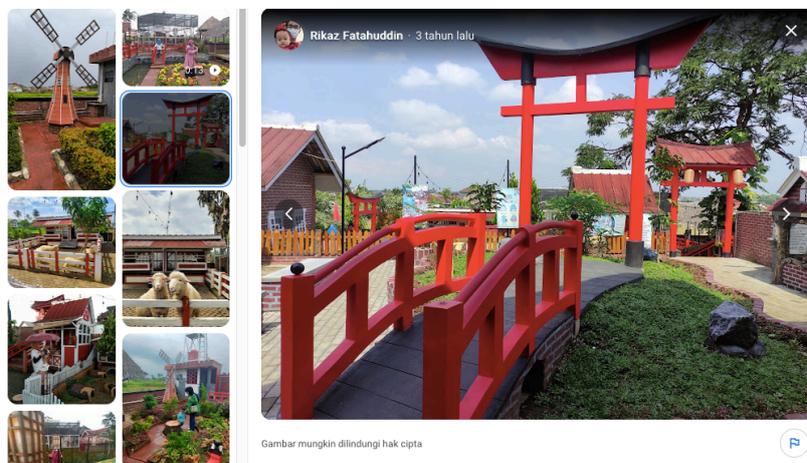
a. Cireong Park



Gambar 1. Cireong Park

Wisata Alam Cireong bisa menjadi pilihan yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Obyek wisata ini lokasinya di Dusun Cireong, Desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Berada tak jauh dari kaki Gunung Sawal. Tempat wisata ini merupakan sebuah aliran Sungai Cireong dengan air jernih, sumbernya langsung dari mata air Gunung Sawal. Di sekitar lokasi wisata ini terdapat pepohonan yang hijau dan rindang menambah kesejukan dengan udara khas pegunungan.

b. Saung Abah Apud



Gambar 2. Saung Abah Apud

Wisata Edukasi di Ciamis, kebun binatang mini Saung Abah Apud Wisata Edukasi di Ciamis, kebun binatang mini Saung Abah Apud /Instagram @saungabahapud_ PR CIAMIS - Pada

hari libur lebaran, biasanya tidak hanya diisi dengan kegiatan bersilaturahmi dan berkunjung ke sanak saudara, namun juga sebagai ajang untuk berekreasi bersama keluarga. Di Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Dusun Ancol, Kecamatan Sindangkasih terdapat destinasi wisata yang menawarkan pengalaman unik, khususnya untuk anak-anak, yaitu Saung Abah Apud.

c. Pasir bentang



Gambar 3. Pasir Bentang

Bagi warga yang ingin menikmati suasana alam Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, destinasi wisata Pasir Bentang bisa menjadi pilihan. Wisata alam tersebut berada di wilayah Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, di kaki Gunung Sawal. Diperoleh kesepahaman bahwa pengembangan potensi daya tarik atau atraksi wisata meliputi daya tarik alami yang bersifat melekat (inherent) dengan keberadaan obyek wisata alam tersebut. Selain daya tarik alami, suatu obyek wisata memiliki daya tarik buatan manusia (man made attraction), unsur-unsur pengembangan pariwisata meliputi:

1. Atraksi

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya), ataupun unsur-unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan sebagainya).

2. Transportasi

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, Jika angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan kendaraan mobil perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi, dan

3. Akomodasi

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) dan yang diadakan khusus peorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas.

4. Fasilitas Pelayanan

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan kawasan usaha dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan dan jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah.

5. Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (pengguna jalan), tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah. Dalam RPJMD 2025-2030 disebutkan bahwa pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, agronomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan pariwisata diusung revisi kebijakannya, yaitu :

1. Menggalakkan kegiatan ekonomi,
2. Memelihara kepribadian nilai adat budaya setempat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
3. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Strategi

Melalui Manajemen Strategik dalam kapasitas "The New Public Service", strategi dijadikan alat untuk mencapai tujuan baik itu tujuan organisasi atau industri pariwisata, maka strategi inklusi dengan kondisi masyarakat, antara lain :

1. Menyatu : yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam komunitas kemasyarakatan.
2. Menyeluruh: yaitu mencakup seluruh aspek dalam pemerintahan dan
3. Integral : yaitu seluruh strategi dipadukan dengan kebijakan yang telah dilaksanakan Bersama.

Strategi Manajemen Publik baru dibidang kepariwisataan, meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh komponen kemasyarakatan dengan orientasi pengembangan strategi secara makro melalui strategi pengembangan pasar dan strategi mengenai keuangan. Hal ini juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan. Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan .

Dampak Pariwisata

Identifikasi Dampak diartikan sebagai suatu proses penetapan mengenai pengaruh dari perubahan sosial ekonomi yang terjadi terhadap masyarakat sebelum ada pengembangan pembangunan dan setelah adanya pengembangan pembangunan.

Dampak Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak akan sebuah pariwisata menjadi studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Pariwisata tentu saja akan memberikan dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat dapat menimbulkan dampak atau pengaruh positif maupun negatif dan yang terkena dampak tersebut adalah masyarakat, lingkungan, ekonomi, serta sosial. Masyarakat dalam lingkungan suatu obyek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu obyek wisata karena mereka memiliki kultur yang dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat obyek wisata, tenaga kerja yang memadai dimana pihak pengelola obyek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup obyek wisata dan memuaskan masyarakat yang memerlukan pekerjaan dimana membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Suatu tempat wisata yang direncanakan dengan baik, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan pola hidup komunitas setempat, tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang lebih baik. Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut. Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial.

Dampak Ekonomi Pariwisata

Mengklasifikasikan dampak ekonomi yang timbul akibat adanya pariwisata, terdiri dari efek langsung, efek tidak langsung dan efek induksi. Dimana efek tidak langsung dan efek induksi termasuk efek sekunder, sedangkan efek tidak langsung merupakan efek primer. Dampak total ekonomi pariwisata adalah keseluruhan jumlah dari pengaruh yang terjadi secara langsung atau tidak, dan dapat di ukur sebagai pengeluaran bruto atau penjualan, penghasilan, penempatan tenaga kerja dan nilai tambah. Konsep dampak ekonomi, masyarakat lokal dapat memperoleh keuntungan jika pengeluaran dari non-lokal warga dimasukkan sebagai tambahan ke dalam ekonomi lokal. Terdapat hubungan mutualis simbiosis antara pariwisata dengan pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga, dapat disepakati bahwa perekonomian dapat maju jika pariwisata dikembangkan.

4. Penutup

Demikianlah Pengabdian Kepada Masyarakat ini disusun, untuk menjadi bahan pertimbangan pihak terkait, Kami yakin laporan ini mendapatkan rangkaian tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah direncanakan akan dapat berjalan dengan baik. Lebih daripada itu, Kami berharap bahwa hasil perencanaan kerja rinci ini dapat menjadi pondasi dan koridor bagi seluruh anggota tim kerja dan pihak lain yang terlibat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terarah, tersinkronisasi, dan bersinergi dengan kegiatan lain yang terkait.

Daftar Pustaka

- Allyreza, R., & Winangsih, R. (2022). Implementasi keputusan Bupati tentang pembentukan desa wisata di Kabupaten Serang (studi desa wisata potensi bahari). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, **7**(2), Article 258. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v7i2.258>
- Azikin, A., & Fewidarto, P. D. (2023). Model pengembangan desa wisata di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, **10**(1), 24–33. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i1.34835>
- Farhan, A., Zahra, S. A., Yuniastoeti, V., Al-Ghaniy, A., & Rahmafitria, F. (2022). Efektivitas kebijakan pengelolaan dan pengembangan desa wisata terhadap pembangunan pariwisata di Desa Mekaraksana. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, **4**(2), Article 1058. <https://doi.org/10.53565/sabbhatayatra.v4i2.1058>
- Fatihin, M. K., Sucipto, S., Raharjo, K. M., & Zulkarnain, Z. (2020). Pendidikan masyarakat sebagai jalan menuju kemandirian desa: Studi model fasilitasi desa wisata. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, **20**(1), 13–22. <https://doi.org/10.17977/um041v20i12025p13-22>
- Idrus, I. A., & Hakim, M. L. (2024). Peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata sawah Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, **5**(1), 1–13. <https://doi.org/10.33822/jpds.v5i1.6342>
- Junaidi, I., Dewi, W. O., Said, A., & Hanafi, H. (2022). Pengembangan desa wisata berkelanjutan: Studi kasus di Desa Paccekke, Kabupaten Barru, Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, **6**(3), 287–301. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.287-301>
- Mamonto, S. S., Sampe, S., & Egeten, M. (2021). Kebijakan pengembangan desa wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, **1**(2), 24–33. <https://doi.org/10.35801/jpsp.v1i2.40611>
- Nguyen, V. K., Natoli, R., & Divisekera, S. (2021). Innovation and productivity in tourism small and medium enterprises: A longitudinal study. *Tourism Management Perspectives*, **38**, Article 100804. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100804>
- Novando, N., Syahrudin, E., Apriliani, A., Hernawan, D., & Ramdani, F. T. (2022). Jejaring kebijakan dalam pengembangan desa wisata. *Karimah Tauhid*, **2**(5), Article 9420. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9420>
- Sari, Y. R., & Kagungan, D. (2016). Kebijakan pengembangan kawasan wisata bahari berbasis kearifan lokal dan penguatan kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Econosains*, **14**(1), 88–104. <https://doi.org/10.21009/econosains.0141.07>